

ISU JURNALIS BERKUALITAS DALAM PEMBERITAAN PERPRES *PUBLISHER RIGHTS*: ANALISIS WACANA KRITIS BERITA DARING KOMPAS.ID PERIODE 2022–2023

Putri Laksmi Nurul Suci
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
putri.l@mail.ugm.ac.id

Abstract

News distribution by media companies is threatened with disruption due to the existence of digital platforms. In response to this, the Indonesian government wants to present a legal basis for the protection of the media ecosystem, called Presidential Regulation Number 32 of 2024 on the Responsibility of Digital Platform Companies to Support Quality Journalism or Publisher Rights. This draft regulation is aimed at creating quality journalism for the Indonesian press. News about this regulation and the issue of quality journalism have appeared in various online media, including Kompas.id. The objective of this research is to seek how the issue of quality journalism is discussed and portrayed by Kompas.id. By using Norman Fairclough's critical discourse analysis, this research analyzes 25 online news for the 2022-2023 period owned by Kompas.id. The results showed that Kompas.id has a strong tendency to spread the issue of quality journalism. Kompas.id can present various points of view and information from sources that have high credibility. In addition, Kompas.id also tends to link the issue of quality journalism with the context of the 2024 elections that are currently underway.

Keywords: *critical discourse analysis, online news, the quality of journalism, Kompas.id, Publisher Rights*

Abstrak

Pendistribusian berita oleh perusahaan media terancam terganggu dikarenakan adanya platform digital. Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia hendak menghadirkan dasar hukum bagi perlindungan ekosistem media, yang disebut dengan *Publisher Rights* atau hak penerbitan karya jurnalistik. Rancangan regulasi ini ditujukan untuk menciptakan jurnalisme berkualitas bagi pers Indonesia. Pemberitaan mengenai Perpres *Publisher Rights* dan isu jurnalisme berkualitas pun muncul di berbagai media daring, termasuk Kompas.id. Penelitian ini pun berusaha untuk melihat bagaimana isu jurnalisme berkualitas diwacanakan dan digambarkan oleh Kompas.id melalui berita daring yang berfokus pada topik Perpres *Publisher Rights*. Dengan menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough, penelitian ini menganalisis 25 berita daring periode 2022–2023 yang dimiliki oleh Kompas.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.id cenderung kuat untuk menyebarkan isu jurnalisme berkualitas. Kompas.id mampu menghadirkan beragam sudut pandang dan informasi dari sumber yang memiliki kredibilitas tinggi. Selain itu, Kompas.id juga cenderung mengaitkan isu jurnalisme berkualitas dengan konteks Pemilu 2024 yang sedang berjalan hingga saat ini.

Kata Kunci: *analisis wacana kritis; berita daring; jurnalisme berkualitas; Kompas.id; Publisher Rights*

Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, masyarakat mengalami perubahan terkait bagaimana cara mengakses informasi. Saat ini, teknologi digital memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai lini dan dalam berbagai bentuk. Reuters Institute Digital News Report 2023 (Newman et al., 2023) melaporkan bahwa media daring dan media sosial adalah sumber informasi paling populer di Indonesia, dengan skor 84% dan 65%. Newman et al. (2023) juga menemukan sebanyak 19% masyarakat Indonesia memutuskan untuk berlangganan berita dari media daring berbayar. Pembaca dengan langganan berbayar pun memiliki kebiasaan yang berbeda, yakni memiliki tingkat aktivitas yang lebih tinggi, keterlibatan yang lebih besar, dan penggunaan yang lebih bervariasi (Wadbring & Berström, 2021). Secara tidak langsung, media berita harus berfokus dan turut menyesuaikan rutinitas baru dari pembaca seiring perkembangan inovasi yang ada (Kormelink, 2022).

Sayangnya, upaya pers Indonesia untuk mengelola pendistribusian berita terancam terganggu dikarenakan adanya platform digital. Fenomena ini membuat ekosistem media tidak bisa dikendalikan langsung oleh pers akibat platform digital global, seperti Google dan Meta. Menurut Ketua Forum Pemimpin Redaksi, Arifin Asyhad, diperlukan regulasi untuk membangun ekosistem media yang lebih baik dan mengajak platform digital global untuk turut serta dalam perancangannya (Sinaga, 2023a). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmana et al., (2023), sebenarnya Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi dan kebijakan terkait konten media berita, namun regulasi dan kebijakan tersebut belum bisa secara maksimal melindungi seluruh perusahaan media, khususnya media lokal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menyediakan regulasi atau kebijakan yang ditujukan untuk melindungi ekosistem media nasional.

Berkaitan dengan persoalan ini, Presiden Indonesia Joko Widodo, menyebutkan ingin segera membuat dasar hukum bagi perlindungan ekosistem media, yang disebut dengan *Publisher Rights* atau hak penerbitan karya jurnalistik, dalam bentuk undang-undang (UU), revisi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, atau Peraturan Pemerintah (PP) (Kristanto, 2022). Wacana mengenai pembentukan regulasi atau kebijakan ini muncul pada 9 Februari 2020 ketika Presiden Joko Widodo memberikan pidato di acara puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2020, dan kembali dibahas di tahun 2021–

2023. Sejak itu, draf rancangan regulasi berjudul "Tanggung Jawab Platform Digital dan Jurnalisme Berkualitas" berusaha disusun oleh Tim *Media Sustainability*, yang dibentuk oleh Dewan Pers. Hasil rancangan regulasi pertama kali diserahkan pada Kemkominfo pada Oktober 2021, dengan target dimasukkan di bagian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tetapi, akibat berbagai pertimbangan, Deputi Hukum Sekretariat Kabinet memberikan masukan agar rancangan regulasi menjadi produk hukum berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden (Kominfo, 2023). Atas pertimbangan kecepatan, maka disepakati sebuah regulasi yang berupa rancangan Peraturan Presiden (Perpres).

Dari sudut pandang bisnis, Perpres *Publisher Rights* ditujukan untuk menciptakan bisnis media yang sehat, antara perusahaan pers dan platform digital (Kaltim Today, 2023). Akan tetapi, prioritas utama dari Perpres *Publisher Rights* adalah untuk mendukung jurnalisme berkualitas, dengan menghadirkan sejumlah ketentuan, seperti kerja sama perusahaan platform digital global dengan perusahaan pers, pembentukan komite, dan pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan tanggung jawab platform digital (Sinaga, 2023c). Wakil Menteri Kemenkominfo, Nezar Patria, mengatakan bahwa Perpres *Publisher Rights* memberikan kesempatan bagi platform digital untuk melakukan *filtering* konten berita dari berbagai perusahaan media (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023). Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif perusahaan media, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, Perpres *Publisher Rights* menciptakan lapangan pertandingan yang setara antara platform digital dan perusahaan media, sehingga perusahaan media dapat menghasilkan produk yang berorientasi pada jurnalisme berkualitas (Sinaga, 2023b).

Isu jurnalisme berkualitas menjadi wacana yang kerap dimunculkan dalam pemberitaan mengenai Perpres *Publisher Rights*. Hal ini didukung oleh maraknya penyebaran hoaks, kabar bohong, atau konten berita lain yang mengorbankan kualitas berita. Menurunnya kualitas berita dibuktikan dari jumlah aduan berita yang diterima oleh Dewan Pers. Pada tahun 2022, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, mengatakan bahwa Dewan Pers menerima sebanyak 690 aduan terkait pemberitaan (Nugraheny & Prabowo, 2023). Aspek ekonomi politik media dapat menjadi salah satu pengaruh isu jurnalisme berkualitas selalu muncul di permukaan ruang diskusi terkait pers dan kinerjanya. Menurut Pickard (dalam Callison & Young, 2022), bidang politik ekonomi media

berkisar pada pembahasan yang ditimbulkan oleh teknologi baru dan kegagalan model bisnis lama. Contoh akibat dari fenomena ini ialah menurunnya pendapatan dari iklan yang menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dan terciptanya ‘gurun berita’, di mana terdapat kota atau wilayah yang tidak terlayani oleh media. Minimnya keikutsertaan media dalam lingkungan masyarakat dapat menimbulkan kerentanan mereka terhadap hoaks, misinformasi, atau berita bohong. Menurut Callison dan Young (2022), dalam kontes ini kita tidak hanya melihat dari konteks model bisnis, namun juga munculnya sejumlah tantangan etika. Pekerja media harus kembali mengevaluasi norma profesional yang harus dipatuhi. Pomerantsev (2019) mengatakan bila pemberian bobot tugas yang sama pada seluruh pihak akan menyebabkan perilaku kontraproduktif, di mana terdapat kecenderungan mengomunikasikan kebohongan kepada para pembaca. Efeknya pun akan berakibat kepada kualitas hasil kerja jurnalistik yang semakin menurun. Akibatnya, isu jurnalisme berkualitas cukup sering ditemukan dan dibahas di berbagai konten berita yang mengulas topik Perpres *Publisher Rights*.

Wacana jurnalisme berkualitas sudah pasti juga dapat ditemui pada salah satu jenama media daring yang dimiliki oleh Grup Kompas Gramedia, yaitu Kompas.id. Kompas.id merupakan media daring berbayar yang mengharuskan pembaca untuk berlangganan sesuai paket berlangganan yang ditawarkan. Sejak kembali munculnya wacana rancangan Perpres *Publisher Rights* pada tahun 2022, Kompas.id turut memberitakan persoalan tersebut secara komprehensif. Pemberitaan Kompas.id mengenai topik ini pun masih berlanjut hingga tahun 2023. Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana isu jurnalisme berkualitas diwacanakan dan digambarkan oleh Kompas.id melalui berita daring yang berfokus pada topik Perpres *Publisher Rights*.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough sebagai metode penelitian. Fairclough dan Wodak (1997) menyatakan bahwa praktik sosial dapat menampilkan efek ideologi, memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antar kelas sosial, laki-laki, perempuan, maupun kelompok minoritas. Maka dari itu, analisis wacana model Fairclough ini juga bisa disebut sebagai model analisis perubahan sosial atau Dialectical-

Relational Approach (DRA). Dengan melihat unsur pentingnya sebuah bahasa yang digunakan dalam sebuah teks, analisis ini pun dirasa sesuai untuk mengetahui bagaimana sebuah wacana terbentuk dari teks berita yang dituliskan oleh Kompas.id.

Fairclough (Eriyanto, 2006) membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi, yaitu teks, *discourse practice* (praktik diskursus), dan *socio-cultural practice* (praktik sosiokultural). *Pertama*, dimensi teks ditujukan untuk membongkar sebuah teks secara linguistik dengan melihat aspek-aspek kebahasaan, melalui identifikasi perlakuan atas peristiwa (tema yang diangkat), sumber yang dikutip (nama dan atribut sosial sumber), dan cara penyajian melalui pilihan fakta dan simbol verbal atau nonverbal yang digunakan. Pada akhirnya, akan didapatkan sebuah makna dari komponen teks yang diteliti untuk menemukan unsur-unsur representasi, relasi, dan identitas. *Kedua*, dimensi praktik diskursus (*discourse practice*) merupakan dimensi yang menentukan bagaimana proses teks tersebut diproduksi dan dikonsumsi. Dimensi ini sangat berkaitan dengan pembuat dan pembaca teks. Sebagai pembuat teks, proses produksi bergantung terhadap pengalaman, pengetahuan, kebiasaan, lingkungan sosial, kondisi, keadaan, konteks, dan aspek lain yang sangat dekat dengan dirinya. Sedangkan bagi pembaca, konsumsi sebuah teks juga dipengaruhi dengan pengetahuan, pengalaman, dan konteks sosial yang mungkin saja berbeda dengan pembuat teks. *Ketiga*, dimensi praktik sosiokultural (*socio-cultural practice*) ialah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks, seperti konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang sedang berkecambah ketika teks berita sedang diproduksi.

Tabel 1. Kerangka Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Dimensi	Unsur	Cara Pengumpulan Data
Teks	Representasi (Bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, serta keadaan, ditampilkan dan digambarkan dalam teks)	<i>Critical linguistic</i> (menekankan pada penggunaan bahasa pada teks yang dilihat dari pilihan kata, struktur kalimat, dan struktur tata bahasa yang digunakan)
	Relasi (Bagaimana hubungan atau keterkaitan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks)	
	Identitas	

	(Bagaimana identitas wartawan (pihak media), khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks)	
Praktik Diskursus (<i>Discourse Practice</i>)	Produksi teks	Identifikasi sudut pandang pembuat dan pembaca teks melalui daftar pustaka dan literatur
	Konsumsi teks	
Praktik Sosiokultural (<i>Socio-cultural Practice</i>)	Situasional (Konteks, situasi atau kondisi saat teks diproduksi)	Daftar pustaka, literatur, tinjauan sejarah, dan sumber informasi lainnya
	Institusional (Peran institusi saat teks diproduksi)	
	Sosial-Budaya (Aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi produksi teks)	

Objek dalam penelitian ini adalah berita daring dari Kompas.id yang berfokus pada topik Perpres *Publisher Rights* di periode tahun 2022–2023. Kompas.id dipilih sebagai objek penelitian utama akibat memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi, yaitu dengan skor 69% (Newman et al., 2023), serta sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Sedangkan, pemilihan periode ini didasarkan pada pembahasan Perpres *Publisher Rights* yang kembali muncul pada rentang waktu tersebut akibat Presiden Joko Widodo mempertanyakan perkembangan rancangannya yang sudah diwacanakan sejak tahun 2020. Data dikumpulkan dengan cara mencari langsung di laman Kompas.id. Peneliti menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan, yaitu ‘*Publisher Rights*’. Hasil dari penelusuran ini adalah 33 berita daring dari berbagai rubrik yang ada di Kompas.id. Akan tetapi, dikarenakan peneliti hanya memilih teks hasil pemberitaan, maka teks yang berada pada rubrik di luar hasil pemberitaan tidak akan dipilih. Oleh karena itu, terdapat 25 berita daring yang akan dianalisis pada penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dimensi Teks

Pada dimensi ini, penulis berusaha membongkar sebuah teks secara linguistik dengan melihat aspek-aspek kebahasaan, yaitu melalui kata, struktur kalimat, dan struktur

bahasa yang digunakan. Hal ini ditujukan untuk melihat unsur representasi, relasi, dan identitas, yang muncul dari sebuah teks.

Sebanyak 25 berita daring di Kompas.id menjadikan Perpres *Publisher Rights* sebagai topik pembahasan utama. Melalui pembahasan ini, isu jurnalisme berkualitas beberapa kali muncul dan menjadi persoalan utama dalam topik Perpres *Publisher Rights*. Hal ini dibuktikan dari pengambilan narasumber berita yang berasal dari institusi dan lembaga yang mendukung terciptanya Perpres *Publisher Rights*, seperti pemerintah Indonesia (presiden dan wakil presiden, Menteri Kemenkominfo dan BUMN, institusi (akademisi, Dewan Pers), dan Non-Governmental Organization (NGO) (PWI, AMSI, ATVI, IDA). Jajaran pihak media berada di posisi mendukung dan tidak mendukung—akibat dampak Perpres *Publisher Rights* masih menimbulkan problematika yang memengaruhi eksistensi perusahaan media. Serta pihak platform digital global, seperti Google dan Meta, yang seluruhnya tidak menyetujui adanya Perpres *Publisher Rights*. Sudut pandang dari pemerintah Indonesia dan institusi/lembaga pers terkait cenderung digunakan oleh Kompas.id, akibat latar belakang pembahasan lebih condong kepada proses perancangan dan wacana awal terbentuknya Perpres *Publisher Rights*, sehingga tanggapan dari pihak di luar itu cenderung belum dibutuhkan. Sudut pandang pihak platform digital cenderung muncul ketika draf Perpres *Publisher Rights* sudah selesai dihimpun.

Walaupun Perpres *Publisher Rights* menjadi topik utama pembahasan, namun isu jurnalisme berkualitas juga kerap muncul di pernyataan beberapa narasumber. Sebelumnya, kehadiran Perpres *Publisher Rights* ditujukan untuk terbentuknya jurnalisme berkualitas bagi perusahaan media. Jurnalisme berkualitas berusaha diwujudkan di lingkup pers Indonesia untuk mengurangi penyebaran hoaks, kabar bohong, dan disinformasi, yang kian marak terjadi. Salah satu penyebab ialah belum adanya regulasi atau kebijakan antara perusahaan media (produsen informasi) dan platform digital (distributor informasi). Isu jurnalisme berkualitas selaras dengan persoalan independensi, akurasi, kredibilitas, bagi perusahaan media dalam penyebaran hasil pemberitaan. Oleh karena itu, tak heran bila isu jurnalisme berkualitas berusaha terus digaungkan melalui pernyataan narasumber, akibat tujuan utama dari hadirnya Perpres *Publisher Rights* ialah untuk menciptakan ruang yang sesuai bagi perusahaan media dan platform digital, yang berdampak juga pada masyarakat. Oleh karena itu, unsur

representasi isu jurnalisme berkualitas dalam dimensi teks pemberitaan Kompas.id dapat ditemukan dan acap kali menjadi pembahasan utama dari beberapa berita daring yang dihasilkan.

Sedangkan, unsur relasi yang muncul di pemberitaan Kompas.id mengindikasikan bahwa Kompas.id berada di ranah netral, tidak condong ke salah satu posisi. Di berita yang disajikan, Kompas.id berusaha untuk melengkapi pernyataan narasumber dengan memberikan bukti yang berasal dari sudut pandang lain. Hal ini dilakukan sekaligus untuk memverifikasi pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Dapat dikatakan relasi yang muncul antara Kompas.id dengan para narasumbernya adalah relasi positif, baik terhadap narasumber yang setuju atau tidak setuju dengan adanya rancangan Perpres *Publisher Rights*. Terakhir, unsur identitas yang dihadirkan oleh Kompas.id cenderung tidak muncul secara eksplisit. Akan tetapi, Kompas.id berusaha untuk menegaskan bahwa isu jurnalisme ini adalah hal penting yang harus diciptakan karena memiliki dampak yang baik juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan Kompas.id tidak melupakan bahwa dirinya juga membawa dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

"Indonesia harus berdikari secara digital. Roda ekonomi digital juga harus mampu menjangkau pelaku usaha besar hingga mikro dan kecil." (dalam judul "Pemerintah Upayakan Keseimbangan Ekosistem Media" 7/2/2022)

"Ketidakadilan ekosistem digital memicu maraknya berita berorientasi sensasi. Media berlomba-lomba mengejar jumlah klik demi memperbesar peluang mendulang pendapatan dari iklan. Tanpa kehadiran negara lewat regulasi yang mendukung media berkelanjutan, upaya memproduksi konten berkualitas akan semakin diabaikan." (dalam judul "Jalan Berliku Menuju Jurnalisme Bermutu" 17/07/2023)

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa isu jurnalisme berkualitas tidak hanya muncul dengan kalimat yang secara eksplisit mengatakan "jurnalisme berkualitas". Akan tetapi, isu jurnalisme berkualitas dapat muncul dengan kata lain, seperti berdikari, mandiri, akurasi, kredibilitas, dan sebagainya. Hal ini juga memiliki tujuan untuk terus mengadvokasi bahwa kehadiran Perpres *Publisher Rights* memang seutuhnya untuk menciptakan jurnalisme berkualitas di ranah perusahaan media.

Dimensi Praktik Diskursus

Dalam dimensi ini, peneliti mencoba untuk melihat proses produksi dan konsumsi teks berita. Akan tetapi, peneliti memiliki keterbatasan dikarenakan tidak bisa melakukan wawancara dengan pihak Kompas.id. Oleh karena itu, peneliti menggunakan literatur dan kajian yang memiliki lingkup pembahasan mengenai cara kerja Kompas.id.

Kompas.id merupakan platform media daring yang memiliki tingkat kepercayaan cukup tinggi di ranah masyarakat, yaitu sebesar 69% (Newman et al., 2023). Di tambah lagi, Kompas.id berani menjadi media daring yang menerapkan model *digital subscription*, dan menjadi media daring pertama di Indonesia yang menggunakan model bisnis ini. Menurut Sutta Dharmasaputra (dalam wawancara yang dilakukan oleh Haq & Fadilah (2018)), Wakil Redaktur Pelaksana Kompas, jurnalisme daring saat ini cenderung mengejar *page view* untuk mendapatkan keuntungan dan menyebabkan maraknya *clickbait* yang didominasi oleh informasi tidak penting bagi masyarakat. Akan tetapi, melalui model bisnis yang ditawarkan, adanya langganan berbayar bagi pembaca pun membuat Kompas.id harus mempertimbangkan aspek jurnalistik dari pemberitaan yang dihasilkan. Selain itu, isu jurnalisme berkualitas juga disinggung di wawancara oleh Haq & Fadilah (2018) terhadap Sutta Dharmasaputra, dirinya mengatakan bahwa platform digital mendapatkan porsi keuntungan lebih besar dibandingkan perusahaan media akibat kemampuannya yang bisa membaca perilaku pengunjung situs. Sayangnya, kemampuan ini tidak dimiliki oleh perusahaan media.

Sedangkan, dari ranah pembaca, peneliti mencoba untuk mewawancarai salah satu penikmat berita dan pelanggan berbayar Kompas.id. Secara garis besar, dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan isu jurnalisme berkualitas. Dirinya merupakan masyarakat awam yang hanya menikmati pemberitaan mengenai polemik pemerintahan Indonesia. Berdasarkan tanggapan yang diberikan, ia mengatakan bahwa Kompas.id selayaknya memberitakan tema lain, di mana tidak menitikberatkan sumber berita hanya dari salah satu narasumber saja. Kemudian, Kompas.id tidak menyajikan berita yang berulang dengan isi teks berita yang sama. Hal ini dibuktikan dengan jumlah berita terkait topik Perpres *Publisher Rights* tidak banyak ditemukan walaupun sudah dikumpulkan dalam rentang satu tahun. Menurut dirinya, Kompas.id tetap berusaha menghadirkan perspektif pihak platform digital yang cenderung tidak menyetujui hadirnya Perpres *Publisher Rights*. Selain itu, menariknya dari Kompas.id, berita yang dikemas berusaha disangkutpautkan dengan ulasan lain yang masih memiliki kesinambungan dengan dunia

pers. Oleh karena itu, pembaca Kompas.id bisa mendapatkan informasi lain selain topik Perpres *Publisher Rights* dan isu jurnalisme berkualitas.

Dimensi Praktik Sosiokultural

Dimensi ini berusaha membedah konteks atau situasi di saat teks berita diproduksi. Pada penelitian ini, isu jurnalisme berkualitas erat berkelindan dengan isu Pemilu 2024. Perusahaan media dan jurnalis memainkan peran penting dalam proses pemilu dengan menjamin penyebaran berita dan beragam opini. Perusahaan media bertanggung jawab membuat pengetahuan yang lebih mendalam tentang kandidat, partai politik, dan program mereka. Oleh karena itu, jurnalis berkontribusi untuk memastikan bahwa isu-isu kepentingan publik tetap menjadi pusat kampanye pemilu. Sebagai penjaga demokrasi, jurnalis juga memainkan peran penting dalam memastikan legitimasi dan penerimaan hasil pemilu (Reporters Without Borders, 2015).

Isu jurnalisme berkualitas berusaha untuk terus digaungkan karena sangat memengaruhi cara kerja pers dan media untuk menyampaikan hasil pemberitaan. Perpres *Publisher Rights* menjadi regulasi yang harus cepat untuk disahkan untuk meminimalisir penyebaran hoaks, kabar bohong, dan disinformasi. Regulasi ini dapat memastikan masyarakat mendapat informasi yang benar dan mendukung keberlangsungan keberlanjutan media. Selain itu, diharapkan regulasi ini dapat menciptakan iklim pemilu yang sehat dengan cara mendukung penyajian informasi secara kredibel dan terpercaya. Hal ini pun dapat memicu profesionalitas yang terbentuk dalam lingkup pers. Wacana mengenai jurnalisme berkualitas pada konteks Pemilu 2024 dapat dilihat melalui pernyataan narasumber yang dituliskan oleh Kompas.id di bawah ini:

“Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berharap momentum tersebut tidak terganggu oleh berbagai hal, terlebih saat ini mendekati Pemilu 2024. ”Mengapa perlu diprioritaskan? Ini sesuai semangat Bapak Presiden sejak 2020 dan dikuatkan lagi dalam pidato beliau pada Hari Pers Nasional 9 Februari 2023 yang meminta publisher rights itu diselesaikan dalam satu bulan. Berarti ini ada keterlambatan sehingga perlu percepatan secara optimal sebagai prioritas regulasi,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (14/7/2023).” (dalam judul "Jalan Berliku Menuju Jurnalisme Bermutu" 17/7/2023)

“Wenseslaus menilai publisher rights sebagai regulasi untuk memastikan jurnalisme berkualitas, perlu segera diterapkan di Indonesia. Dia

berpandangan, regulasi ini akan mengantisipasi konten-konten hoaks, apalagi menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.” (dalam judul “Masih Ada Kebuntuan dalam Pengusulan ‘Publisher Rights’” 29/7/2023)

“Namun, menghadirkan jurnalisme berkualitas dan dapat dipercaya adalah sebuah elan yang terus diperjuangkan oleh para jurnalis di Kompas, apalagi menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024 yang akan menggunakan medsos sebagai cara untuk menjangkau para pemilih.” (dalam judul “Jurnalisme Bermutu dalam ‘Kegenitan’ Medsos” 31/7/2023)

“Di sisi lain, regulasi ini pun penting untuk menekan penyebaran hoaks. Regulasi ini dapat memastikan masyarakat mendapat informasi yang benar. Ini penting agar masyarakat bisa membuat keputusan terbaik untuk hidupnya, terlebih Pemilu 2024 sudah di depan mata. Hal ini bisa dicapai dengan peran media massa.” (dalam judul “Pastikan Transparansi Draf ‘Publisher Rights’” 10/8/2023)

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, Kompas.id cenderung kuat untuk menyebarkan isu jurnalisme berkualitas melalui topik pemberitaan mengenai Perpres *Publisher Rights*. Melalui dimensi teks, Kompas.id kerap menggunakan pernyataan narasumber yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, yaitu berasal dari pihak pemerintah, institusi, akademisi, NGO, dan platform digital. Walaupun pernyataan dari pihak platform digital cenderung minim ditemukan akibat rancangan Perpres *Publisher Rights* baru selesai disusun dua bulan lalu, sehingga pihak platform digital dirasa belum banyak berkomentar ketika rancangan Perpres *Publisher Rights* masih dalam proses. Melalui pernyataan sumber yang kredibel, isu jurnalisme berkualitas terus menjadi persoalan utama agar Perpres *Publisher Rights* cepat untuk selesai dan disahkan.

Selanjutnya, pada dimensi praktik diskursus (*discourse practice*), Kompas.id sangat mempertimbangkan aspek jurnalistik dari pemberitaan yang dihasilkan. Hal ini dipicu oleh Kompas.id merupakan jenis media daring yang memiliki model bisnis yang berbeda. Sedangkan, pembaca Kompas.id cenderung puas dengan hasil pemberitaan yang disajikan. Dengan model teks yang panjang, Kompas.id mampu menghadirkan beragam sudut pandang dan informasi lain yang masih memiliki keterkaitan dengan isu jurnalisme berkualitas dan Perpres *Publisher Rights*. Terakhir ialah dimensi praktik sosiokultural (*socio-cultural practice*). Pada dimensi ini, isu jurnalisme berkualitas sangat erat dengan kontestasi politik, khususnya Pemilu 2024. Isu ini menjadi penting akibat perusahaan media dan jurnalis memainkan peran penting dalam proses pemilu. Selain itu, isu

jurnalisme berkualitas juga berfungsi untuk menekan penyebaran hoaks, kabar bohong, dan disinformasi.

Daftar Pustaka

- Callison, C., & Young, M. L. (2022). How quality journalism forgets about the marginalised. *European Journal of Communication*, 37(4), 460–464. <https://doi.org/10.1177/02673231221112725>
- Eriyanto. (2006). Analisis wacana: Pengantar analisis teks media. Yogyakarta: LKiS.
- Haq, A. D., & Fadilah, E. (2018). Transformasi Harian Kompas menjadi portal berita digital subscription Kompas.id. *Kajian Jurnalisme*, 1(2), 190–213. <https://doi.org/10.24198/jkj.v1i2.21339>
- Kaltim Today. (2023, July 27). Perpres Publisher Rights: Pengaturan terbaru hubungan media dan platform online di Indonesia. *Kaltim Today*. <https://kaltimtoday.co/perpres-publisher-rights-pengaturan-terbaru-hubungan-media-dan-platform-online-di-indonesia>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023, July 25). Pengaturan Publisher Rights, Wamenkominfo: Pemerintah Ambil Jalan Tengah (SIARAN PERS NO. 163/HM/KOMINFO/07/2023). *Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/50385/siaran-pers-no-163hmkominfo072023-tentang-pengaturan-publisher-rights-wamenkominfo-pemerintah-ambil-jalan-tengah/0/siaran_pers
- Kepplinger, H. M. (2008). Media effects: Direct and indirect effects. In W. Donsbach (Ed.), *The international encyclopedia of communication, first edition*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Kepplinger, H. M., & Zerback, T. (2012). Direct and indirect effects of media coverage: Exploring the effects of presumed media influence on judges, prosecutors, and defendants. *Studies in Communication Media*, 1(3–4), 473–492. https://www.researchgate.net/publication/266384347_Direct_and_indirect_effects_of_media_coverage_Exploring_the_effects_of_presumed_media_influence_on_judges_prosecutors_and_defendants
- Kompas.id. (n.d.). Tentang kami [Laman Situs Web]. <https://www.kompas.id/tentang-kami>

- Kormelink, T. G. (2023). How people integrate news into their everyday routines: A context-centered approach to news habits. *Digital Journalism*, 11(1), 19–38. <https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2112519>
- Kristanto, T. A. (2022, February 17). Hak Penerbit Jurnalistik dan Hadirnya Jurnalisme Berkualitas. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/02/16/hak-penerbit-jurnalistik-dan-hadirnya-jurnalisme-berkualitas?open_from=Search_Result_Page
- Newman, N., Fletcher, R., Eddy, K., Robertson, C. T., Nielsen, R. K. (2023). *Digital news report 2023*. Reuters Institute for the Study of Journalism. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2023-06/Digital_News_Report_2023.pdf
- Nugraheny, D. E., & Prabowo, D. (2023, February 6). Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan ada 690 aduan soal pemberitaan. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/06/15261991/bertemu-jokowi-dewan-pers-laporkan-ada-690-aduan-soal-pemberitaan>.
- Pomerantsev, P. (2019). *This is not propaganda: Adventures in the war against reality*. Faber & Faber.
- Reporters Without Borders. (2015). Handbook for journalists during elections. Organisation Internationale de la francophonie. https://rsf.org/sites/default/files/handbook_for_journalists_during_elections.pdf
- Rohmana, R. D., Budhijanto, D., & Rafianti, L. (2023). Keutamaan Prinsip Fairness dan Publisher Right Dalam Melindungi Perusahaan Media Nasional di Era Disrupsi Digital. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(11), 2670–2685. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.662>
- Sinaga, T. M. (2023a, February 8). Profesionalisme kerja jurnalistik pulihkan kepercayaan publik. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/07/profesionalisme-kerja-jurnalistik-pulihkan-kepercayaan-publik?open_from=Search_Result_Page
- Sinaga, T. M. (2023b, July 12). Pers Menanti Regulasi ”Publisher Rights”. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/12/regulasi-publisher-rights-dinanti>

- Sinaga, T. M. (2023c, July 17). UU Pers sebagai roh regulasi "publisher rights". *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/17/uu-pers-sebagai-roh-regulasi-publisher-rights>
- Sun, Y., Shen, L., & Pan, Z. (2008). On the behavioral component of the third-person effect. *Communication Research*, 35(2), 257–278. <https://doi.org/10.1177/0093650207313167>
- Vehkoo, J. (2010). *What is quality journalism and how it can be saved*. Reuters Institute Fellowship Paper. University of Oxford. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/what-quality-journalism-and-how-can-it-be-saved>
- Wadbring, I., & Bergström, L. (2021). Audiences behind the paywall: News navigation among established versus newly added subscribers. *Digital Journalism*, 9(3), 319–335. <https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1878919>